

ABSTRAK

BUMDes Tirta Mandiri merupakan salah satu BUMDes terbaik di Indonesia dengan perolehan keuntungan yang relatif besar, sehingga dinilai mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan cara melibatkan mereka ke dalamnya. Namun, perputaran ekonomi yang begitu besar membuat BUMDes menjadi rentan terhadap kepentingan-kepentingan. Hal ini menyebabkan BUMDes menjadi arena negosiasi ekonomi-politik bagi para pengelola BUMDes dengan masyarakat desa. Dengan demikian, aset sumber daya alam yang dimiliki oleh desa hanya dapat dinikmati oleh aktor-aktor tertentu. Penelitian ini bertujuan melihat dinamika negosiasi ekonomi-politik yang terjadi antara pengelola BUMDes dengan masyarakat. Pendekatan interpretif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menganalisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik oligarki di dalam BUMDes Tirta Mandiri menyebabkan distribusi kesejahteraan yang tidak merata karena aset sumber daya alam milik desa dikuasai oleh sekelompok orang tertentu yang memiliki kuasa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat biasa yang tidak memiliki kedekatan dengan rezim penguasa menjadi kesulitan dalam memperoleh akses. Selain itu, temuan lain juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Ponggok di dalam BUMDes Tirta Mandiri hanya sampai pada level “*degrees of tokenism*”. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat hanya sebatas menyampaikan aspirasi dan aspirasi tersebut hanya ditampung oleh pengelola tanpa ada tindak lanjutnya. Dengan demikian wacana mengenai kesejahteraan masyarakat menjadi problematis karena manfaat dari adanya BUMDes hanya dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan penguasa, sedangkan masyarakat biasa tidak dapat merasakan manfaatnya.

Kata kunci: BUMDes, Oligarki, Negosiasi, Partisipasi, Umbul Ponggok

ABSTRACT

BUMDes Tirta Mandiri is one of the best BUMDes in Indonesia with relatively large profits, so that it is considered capable of providing welfare to rural communities by involving them in it. However, such a large economic turnaround makes BUMDes vulnerable to interests. This causes BUMDes become an arena for political-economic negotiations for BUMDes managers with community. Thus, natural resource assets owned by villages can only be enjoyed by certain actors. This study aims to look at the dynamics of political-economic negotiations that occur between BUMDes managers and community. Interpretive approach is used in this study to obtain and analyze data. The research findings show that the practice of oligarchy in BUMDes Tirta Mandiri causes an uneven distribution of welfare because the village's natural resource assets are controlled by a certain group of people who have power. This condition causes ordinary people who do not have a closeness to the ruling regime to be difficult in gaining access. In addition, other findings also indicate that the participation of the Ponggok Village community in BUMDes Tirta Mandiri only reaches the "degrees of tokenism" level. This condition shows that community participation is only limited to conveying aspirations and these aspirations are only accommodated by the management without any follow-up. Thus the discourse regarding community welfare becomes problematic because the benefits of the BUMDes are only felt by people who are close to the authorities, whereas the community cannot feel the benefits.

Keywords: BUMDes, Oligarchy, Negotiations, Participation, Umbul Ponggok